



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/105/II/2024

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);

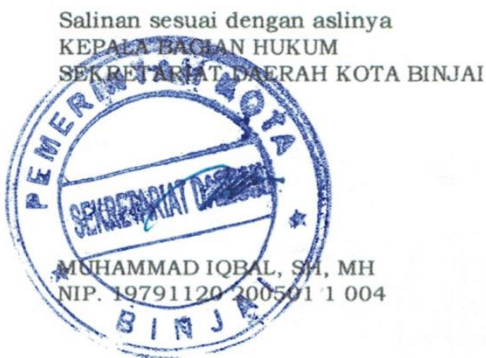
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
16. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 49);
17. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
18. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 44);
19. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dialokasikan untuk setiap kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 setelah memperhitungkan pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- KEEMPAT : Pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terhitung mulai bulan Januari 2024.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 100.3.3.3/105/II/2024
 TENTANG
 BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN
 ANGGARAN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
 KONDISI KERJA MENURUT TINGKATAN JABATAN

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
1	DINAS PENDIDIKAN (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD	9	3.300.000	
	5	Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Akreditasi SD/SMP	9	3.300.000	
	6	Kepala Seksi	8	3.203.000	
	7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	8	Ketua Tim Kerja Keuangan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	9	Ketua Tim Kerja /Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok JF				
	10	Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000	
	11	Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000	
	12	Fungsional Ahli Pertama	8	1.380.000	
	Kelompok Pelaksana				
	13	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	14	Bendahara	7	1.360.000	
	15	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	16	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	17	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
2	DINAS KESEHATAN (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.900.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.200.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.275.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9	3.350.000	
	5	Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	9	3.350.000	
	6	Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Serta Kesehatan Jiwa/Pejabat Fungsional	9	3.350.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	7	Ketua Tim Kerja Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan/Pejabat Fungsional	9	3.350.000	
	8	Ketua Tim Kerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/Pejabat Fungsional	9	3.350.000	
	9	Ketua Tim Kerja/Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	Kelompok JF				
	10	Dokter/Dokter Gigi Ahli Utama	14	1.700.000	
	11	Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya	12	1.600.000	
	12	Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda	10	1.460.000	
	13	Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000	
	14	Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000	
	15	Fungsional Ahli Pertama / Penyelia	8	1.380.000	
	16	Fungsional Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.367.000	
	17	Fungsional Pelaksana / Terampil	6	1.152.000	
	Kelompok Pelaksana				
	18	Jabatan Pelaksana	7	1.367.000	
	19	Bendahara	7	1.367.000	
	20	Jabatan Pelaksana	6	1.152.000	
	21	Jabatan Pelaksana	5	1.145.000	
	22	Jabatan Pelaksana	3	1.122.000	
	23	Jabatan Pelaksana	1	1.115.000	
3	RSUD DR.RM. DJOELHAM				
	1	Direktur	14	12.900.000	
	2	Wakil Direktur	12	6.200.000	
	3	Kepala Bidang / Kepala Bagian	11	5.275.000	
	4	Ketua Tim Kerja Penelitian/Pengembangan dan Akreditasi/Pejabat Fungsional	9	3.350.000	
	5	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	Kelompok JF				
	6	Dokter Ahli Utama	14	1.700.000	
	7	Dokter Ahli Madya	12	1.600.000	
	8	Dokter Ahli Muda	10	1.460.000	
	9	Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000	
	10	Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000	
	11	Fungsional Ahli Pertama / Penyelia	8	1.380.000	
	12	Fungsional Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1.367.000	
	13	Fungsional Pelaksana / Terampil	6	1.152.000	
	Kelompok Pelaksana				
	14	Jabatan Pelaksana	7	1.367.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	15	Bendahara	7	1.367.000	
	16	Jabatan Pelaksana	6	1.152.000	
	17	Jabatan Pelaksana	5	1.145.000	
	18	Pengemudi VVIP/Ambulan	4	1.130.000	
	19	Jabatan Pelaksana	3	1.122.000	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (TIPE C)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja Evaluasi Rencana Tata Ruang / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	7	Ketua Tim Kerja Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	8	Ketua Tim Kerja Data dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	9	Ketua Tim Kerja Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung-Gedung / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	10	Ketua Tim Kerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	11	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	12	Kepala UPTD	9	3.300.000	
	13	Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	14	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	15	Bendahara	7	1.360.000	
	16	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	17	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	18	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Penindakan Bangunan/Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	7	Ketua Tim Kerja Pengembangan Perumahan dan Pemukiman / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	8	Ketua Tim Kerja Jalan Lingkungan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	9	Ketua Tim Kerja Sanitasi Lingkungan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	10	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional Ahli Muda	8	3.203.000	
	11	Kepala UPTD Rusunawa	9	3.300.000	
	12	Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	13	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	14	Bendahara	7	1.360.000	
	15	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	16	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SAT POL PP) TIPE B				
	1	Kepala Satuan	14	12.900.000	
	2	Sekretaris	12	6.200.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.275.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.350.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.250.000	
	6	Kepala Seksi	8	3.250.000	
	7	Ketua Tim Kerja Teknis Fungsional / Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	8	Ketua Tim Kerja Kerjasama / Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	9	Ketua Tim Kerja Bina Potensi Masyarakat / Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	Kelompok Pelaksana				
	10	Jabatan Pelaksana	7	1.500.000	
	11	Bendahara	7	1.500.000	
	12	Jabatan Pelaksana	6	1.340.000	
	13	Jabatan Pelaksana	5	1.235.000	
	14	Jabatan Pelaksana	3	1.140.000	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (TIPE B)				
	1	Kepala Badan	14	12.900.000	
	2	Sekretaris Badan	12	6.200.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.275.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.350.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.250.000	
	6	Kepala Sub Bagian Program	8	3.250.000	
	7	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.500.000	
	9	Bendahara	7	1.500.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.340.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.235.000	
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	1	Kepala Badan	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Badan	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Program	8	3.203.000	
	6	Kepala Sub Bagian Umum	8	3.203.000	
	7	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
9	DINAS SOSIAL (TIPE A)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	5	Ketua Tim Kerja Keuangan/Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	6	Ketua Tim Kerja Program/Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	7	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Kepala UPTD Metrologi	9	3.300.000	
	7	Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi	8	3.203.000	
	8	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	9	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	10	Bendahara	7	1.360.000	
	11	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	12	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	13	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Kepala UPTD PPA	9	3.300.000	
	7	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Kepala UPTD	9	3.300.000	
	7	Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000	
	8	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	9	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	10	Bendahara	7	1.360.000	
	11	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	12	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	13	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	5	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan/Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
15	DINAS PERHUBUNGAN (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Kepala Seksi	8	3.203.000	
	7	Kepala UPTD	9	3.300.000	
	8	Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000	
	9	Ketua Tim Kerja Pembinaan Penggunaan Lalu Lintas/Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	10	Ketua Tim Kerja Prasarana/Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	11	Ketua Tim Kerja Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung/Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok JF				
	12	Fungsional Pelaksana	6	1.148.000	
	13	Fungsional Pemula	5	1.140.000	
	Kelompok Pelaksana				
	14	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	15	Bendahara	7	1.360.000	
	16	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	17	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (TIPE C)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (TIPE B)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (TIPE A)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	5	Ketua Tim Kerja Keuangan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	6	Ketua Tim Kerja Program / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	7	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
20	DINAS PERPUSTAKAAN (TIPE C)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	5	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Program / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
21	DINAS PARIWISATA (TIPE C)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	5	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Program / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	8	Bendahara	7	1.360.000	
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (TIPE A)				
	1	Kepala Dinas	14	12.700.000	
	2	Sekretaris Dinas	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	5	Kepala UPTD	9	3.300.000	
	6	Kepala Tata Usaha UPTD	8	3.203.000	
	7	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Aset / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	8	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	9	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok JF				
	10	Fungsional Ahli Madya	11	1.550.000	
	11	Fungsional Ahli Muda	9	1.425.000	
	12	Fungsional Ahli Pertama	8	1.380.000	
	13	Fungsional Pelaksana	6	1.148.000	
	14	Fungsional Pemula	5		
	Kelompok Pelaksana				
	15	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	16	Bendahara	7	1.360.000	
	17	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	18	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
23	INSPEKTORAT DAERAH KOTA				
	1	Inspektur	14	25.000.000	
	2	Sekretaris	12	7.850.000	
	3	Inspektur Pembantu	11	7.150.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	5.175.000	
	5	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	8	5.100.000	
	Kelompok JF				
	6	JF Auditor Ahli Madya	12	6.150.000	
	7	JF Auditor Ahli Muda	10	4.650.000	
	8	JF Auditor Ahli Pertama	8	4.150.000	
	9	JF Auditor Penyelia	8	3.650.000	
	10	JF PPUPD Ahli Madya	12	6.150.000	
	11	JF PPUPD Ahli Muda	10	4.650.000	
	12	JF PPUPD Ahli Pertama	8	4.150.000	
	Kelompok Pelaksana				
	13	Jabatan Pelaksana	7	2.100.000	
	14	Bendahara	7	2.100.000	
	15	Jabatan Pelaksana	6	1.580.000	
	16	Jabatan Pelaksana	5	1.480.000	
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (TIPE B)				
	1	Kepala Badan	14	15.000.000	
	2	Sekretaris Badan	12	6.200.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.275.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.350.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.250.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.250.000	
	Kelompok Pelaksana				
	7	Jabatan Pelaksana	7	1.367.000	
	8	Bendahara	7	1.367.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	9	Jabatan Pelaksana	6	1.152.000	
	10	Jabatan Pelaksana	5	1.145.000	
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (TIPE A)				
	1	Kepala Badan	14	24.500.000	
	2	Sekretaris Badan	12	7.650.000	
	3	Kepala Bidang	11	7.100.000	
	4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	5.050.000	
	5	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung	9	5.150.000	
	6	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung	9	5.150.000	
	7	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	9	5.150.000	
	8	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	9	5.150.000	
	9	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja	9	5.150.000	
	10	Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Dan Belanja	9	5.150.000	
	11	Kepala Sub Bidang	8	5.050.000	
	12	Ketua Tim Kerja Keuangan / Pejabat Fungsional	9	5.150.000	
	13	Ketua Tim Kerja Program / Pejabat Fungsional	8	5.050.000	
	14	Ketua Tim Kerja Verifikasi Anggaran Belanja Dan Pendapatan / Pejabat Fungsional	9	5.150.000	
	15	Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Keuangan Daerah / Pejabat Fungsional	9	5.150.000	
	16	Ketua Tim Kerja Administrasi Dan Pelaporan Pembendaharaan / Pejabat Fungsional	8	5.050.000	
	17	Ketua Tim Kerja Pengendalian PBB Dan BPHTB / Pejabat Fungsional	8	5.050.000	
	18	Ketua Tim Kerja Pelayanan Retribusi Dan Pajak Daerah Lainnya / Pejabat Fungsional	8	5.050.000	
	19	Ketua Tim Kerja Pengendalian Aset Daerah / Pejabat Fungsional	8	5.050.000	
	Kelompok Pelaksana				
	20	Jabatan Pelaksana	7	2.000.000	
	21	Bendahara	7	2.000.000	
	22	Jabatan Pelaksana	6	1.560.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	23	Jabatan Pelaksana	5	1.460.000	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (TIPE B)				
	1	Kepala Badan	14	13.500.000	
	2	Sekretaris Badan	12	6.150.000	
	3	Kepala Bidang	11	5.200.000	
	4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	9	3.300.000	
	5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	6	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok JF				
	7	Fungsional Ahli Pertama	8	1.380.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
27	SEKRETARIAT DPRD				
	1	Sekretaris DPRD	14	12.700.000	
	2	Kepala Bagian	12	6.150.000	
	3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	3.203.000	
	4	Ketua Tim Kerja Program dan Keuangan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	5	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	6	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	7	Bendahara	7	1.360.000	
	8	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	9	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
28	KECAMATAN BINJAI SELATAN (TIPE B)				
	1	Camat	12	7.500.000	
	2	Sekretaris Camat	11	3.800.000	
	3	Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000	
	4	Lurah	9	5.000.000	
	5	Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000	
	6	Sekretaris Lurah	8	2.500.000	
	7	Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
29	KECAMATAN BINJAI TIMUR (TIPE B)				
	1	Camat	12	7.500.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	2	Sekretaris Camat	11	3.800.000	
	3	Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000	
	4	Lurah	9	5.000.000	
	5	Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000	
	6	Sekretaris Lurah	8	2.500.000	
	7	Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
30	KECAMATAN BINJAI BARAT (TIPE B)				
	1	Camat	12	7.500.000	
	2	Sekretaris Camat	11	3.800.000	
	3	Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000	
	4	Lurah	9	5.000.000	
	5	Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000	
	6	Sekretaris Lurah	8	2.500.000	
	7	Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	12	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
	13	Jabatan Pelaksana	1	1.100.000	
31	KECAMATAN BINJAI KOTA (TIPE B)				
	1	Camat	12	7.500.000	
	2	Sekretaris Camat	11	3.800.000	
	3	Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000	
	4	Lurah	9	5.000.000	
	5	Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000	
	6	Sekretaris Lurah	8	2.500.000	
	7	Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	12	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
	13	Jabatan Pelaksana	1	1.100.000	
32	KECAMATAN BINJAI UTARA (TIPE B)				
	1	Camat	12	7.500.000	
	2	Sekretaris Camat	11	3.800.000	
	3	Kasubbag Keuangan Kecamatan	9	3.300.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	4	Lurah	9	5.000.000	
	5	Kasubbag dan Kasie Kecamatan	8	3.203.000	
	6	Sekretaris Lurah	8	2.500.000	
	7	Kepala Seksi Kelurahan	8	2.400.000	
	Kelompok Pelaksana				
	8	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	9	Bendahara	7	1.360.000	
	10	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	11	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
33	BAGIAN UMUM				
	1	Sekretaris Daerah	15	27.000.000	
	2	Asisten Ahli	14	13.000.000	
	3	Staf Ahli	13	12.700.000	
	4	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	5	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	Kelompok Pelaksana				
	6	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	7	Bendahara	7	1.360.000	
	8	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	9	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
	10	Jabatan Pelaksana	3	1.118.000	
	11	Jabatan Pelaksana	1	1.100.000	
34	BAGIAN PEMERINTAHAN				
	1	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	2	Ketua Tim Kerja Administrasi Pemerintahan / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	3	Ketua Tim Kerja Administrasi Wilayah / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	4	Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Otonomi Daerah / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	5	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	6	Bendahara	7	1.360.000	
	7	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	8	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
35	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	1	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	2	Ketua Tim Kerja Bina Mental Spiritual / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	3	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	4	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	5	Bendahara	7	1.360.000	
	6	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	7	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
36	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA				
	1	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	2	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	3	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	4	Bendahara	7	1.360.000	
	5	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	6	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
37	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
	1	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	2	Ketua Tim Kerja Penyusunan Program / Pejabat Fungsional	9	3.300.000	
	3	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	4	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	5	Bendahara	7	1.360.000	
	6	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	7	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
38	BAGIAN ORGANISASI				
	1	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	2	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	3	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	4	Bendahara	7	1.360.000	
	5	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	6	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
39	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				
	1	Kepala Bagian	12	7.500.000	
	2	Kepala Sub Bagian Protokol	8	3.203.000	
	3	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	
	Kelompok Pelaksana				
	4	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	
	5	Bendahara	7	1.360.000	
	6	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	
	7	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	
40	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
	1	Kepala Bagian	12	6.150.000	2.350.000
	2	Kepala Sub Bagian	8	3.203.000	797.000
	3	KELOMPOK PEMILIHAN PBJ (POKMIL PBJ)			
		a. Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.360.000	5.640.000
		b. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	1.360.000	5.640.000
		c. Pranata Barang dan Jasa	5	1.140.000	5.640.000

Kelompok.....

NO	SKPD		KELAS	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA
	Kelompok Pelaksana				
	4	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	-
	5	Bendahara	7	1.360.000	-
	6	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	-
	7	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	-
41	BAGIAN HUKUM				
	1	Kepala Bagian	12	6.150.000	1.350.000
	2	Ketua Tim Kerja / Pejabat Fungsional	8	3.203.000	1.297.000
	Kelompok Pelaksana				
	3	Jabatan Pelaksana	7	1.360.000	440.000
	4	Bendahara	7	1.360.000	-
	5	Jabatan Pelaksana	6	1.148.000	-
	6	Jabatan Pelaksana	5	1.140.000	-



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH